

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KOMPAS	14	2-8-2002

Soal KPC, Pemerintah Harus Jaga Wibawa

JAKARTA, KOMPAS _ Keputusan pemerintah soal divestasi 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) harus dipertahankan demi menjaga wibawa pemerintah. Jika pemerintah pusat tidak bisa mempertahankan keputusannya, investor asing akan bertanya-tanya siapa yang berkuasa di negara ini.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association-IMA) PL Coutrier kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8).

Pemerintah dalam sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan, 51 saham KPC yang ditawarkan dibagi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar 31 persen, dan 20 persen sisanya untuk pemerintah pusat. Akan tetapi, Pemprov Kaltim meno-

lak keputusan itu sebab ingin menguasai 51 persen saham yang harus divestasi tersebut. Itu juga merupakan hasil rapat paripurna DPRD Kaltim yang digelar beberapa jam setelah pengumuman itu.

"Apa yang sudah diputuskan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka kewibawaan pemerintah akan dipertanyakan. Investor yang berniat akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia, sedangkan yang sudah ada di dalam negeri tidak akan mau memperpanjang kontrak," ujar Coutrier.

Menurut dia, masalah KPC harus dilihat dampaknya secara luas ke sektor lain, bukan hanya pada sektor pertambangan. Apalagi pada sektor industri sepatu yang saat ini banyak kehilangan order untuk merek Reebok, Nike, dan Adidas.

Sebenarnya, kata Coutrier, penawaran saham yang akhirnya dilakukan KPC setelah

tertunda-tunda beberap kali patut dihargai. Masalahnya sekarang, bagaimana pemerintah pusat melakukan perundingan kepada Gubernur Kaltim untuk dapat menerima keputusan yang sudah dibuat, serta berfikir strategis.

Coutrier juga mengingatkan, masyarakat Kaltim agar jangan sampai mengganggu jalannya produksi KPC, sebab masalah mereka adalah dengan pemerintah pusat. Selain itu, jika produksi terganggu sehari maka berarti ikut mengurangi pemasukan pajak bagi negara dan juga pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Coutrier, tugas pemerintah pusat adalah mencegah terjadinya gangguan produksi KPC, karena apa yang terjadi di Indonesia menjadi tontonan dunia. Kalau mengganggu produksi serta keamanan pekerja, investor akan mempertanyakan di mana janji pemerintah yang selalu disebut-sebut. (BOY)